



OPINI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI

Dian Permatasari¹, Karina Anjani Nasution², Muhammad Rozan Khairi³, Fazri Fadhilah Tambunan⁴

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Lap. Golf No.120, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: Dianpermatasari032@gmail.com

Abstract (English)

This journal explores the strategic role of public opinion in democratic systems, focusing on three key aspects: the reciprocal relationship between elections and public opinion, polling influences on public opinion, and impacts on political legitimacy. Employing a literature review methodology, this study analyzes relevant articles and research to understand public opinion dynamics. The findings indicate that public opinion significantly influences public policy, election outcomes, and political legitimacy. This research contributes to a deeper understanding of public opinion's role in democratic systems and its implications for democratic development.

Article History

Submitted: 04 January 2025

Accepted: 13 January 2025

Published: 14 January 2025

Key Words

Publik Opinion, Democratic Systems, Elections, Polling, Political Legitimacy

Abstrak (Indonesia)

Jurnal ini membahas peran strategis opini publik dalam sistem demokrasi, dengan fokus pada tiga aspek kunci: hubungan timbal balik antara pemilu dan opini publik, pengaruh polling terhadap opini publik, serta dampaknya terhadap legitimasi politik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, menganalisis artikel dan penelitian relevan untuk memahami dinamika opini publik. Hasilnya menunjukkan bahwa opini publik mempengaruhi kebijakan publik, hasil pemilu, dan legitimasi politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran opini publik dalam sistem demokrasi dan implikasinya bagi pengembangan demokrasi.

Sejarah Artikel

Submitted: 04 January 2025

Accepted: 13 January 2025

Published: 14 January 2025

Kata Kunci

Opini Publik, Sistem Demokrasi, Pemilu, Polling, Legitimasi Politik

Pendahuluan

Istilah Opini Publik pertama kali digunakan oleh Machiavelli dalam pengertiannya yang modern. Dalam bukunya ‘Discourse’ dinyatakan: “bahwa orang yang bijaksana tidak akan mengabaikan opini publik mengenai soal-soal tertentu..”Rousseau disebut sebagai pemikir politik pertama yang melakukan analisis yang luas mengenai opini publik.

Dia menyadari bahwa semua pemerintahan pada dasarnya terletak pada pendapat dan bukannya pada hukum atau paksaan. James Madison menulis bahwa Opini Publik adalah kedaulatan yang nyata (real sovereign) dalam setiap negara merdeka.

Dalam sistem demokrasi, opini publik memainkan peran krusial dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Demokrasi, yang berasal dari kata Yunani "demos" (rakyat) dan "kratos" (kekuasaan), menekankan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Partisipasi masyarakat dalam proses politik, melalui pemilihan umum dan diskusi publik, menciptakan ruang bagi suara rakyat untuk didengar. Dengan demikian, opini publik tidak





hanya mencerminkan pandangan masyarakat, tetapi juga menjadi alat evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan bersama.

Dalam negara yang menganut Demokrasi, Opini Publik mendapat tempat terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah secara bebas. Baik melalui media massa, tulisan maupun penelitian ilmiah yang menegaskan sikap pandangan sebagian masyarakat. Keterbukaan seperti ini sulit ditemui di negara dengan sistem totaliter, monarki, maupun sosialis.

Sistem demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memerlukan partisipasi aktif dari warga negara untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan pemerintahan. Menurut Dahl (2000), demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Opini publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena mempengaruhi kebijakan publik, hasil pemilu dan legitimasi politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami opini publik dalam sistem demokrasi secara mendalam. Metode yang diterapkan meliputi studi literatur yang mencakup artikel dan penelitian yang relevan sebagai referensi peneliti dalam menulis.

Pembahasan

1. Hubungan Antara Pemilu dan Opini Publik

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pilihan politik mereka. Pemilu mempengaruhi pembentukan opini publik melalui debat, kampanye dan kegiatan politik lainnya. Opini publik ini kemudian mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih kandidat (Farid, 2023). Di Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan dinamika opini publik yang berkembang di masyarakat. Opini publik dapat dipahami sebagai pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik, termasuk kandidat dan partai politik. Hubungan antara pemilu dan opini publik sangat penting untuk dipahami, karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses demokrasi. Opini publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan publik dan hasil pemilu (McNair, 1999), namun juga menghadapi tantangan seperti manipulasi informasi dan penyebaran hoaks (Habermas, 2006).

Di era digital saat ini, media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik menjelang pemilu. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram menjadi saluran utama bagi kandidat untuk menyampaikan pesan mereka dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Sistem demokrasi di era digital memerlukan partisipasi aktif warga negara melalui platform digital (Castells, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disebar di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu tertentu. Namun, media sosial juga dapat menjadi arena penyebaran hoaks dan informasi yang mengelilingi, yang dapat mendukung pandangan masyarakat dan menciptakan



polarisasi. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk kritis terhadap informasi yang mereka terima.

Lembaga survei melakukan pengumpulan data untuk menentukan preferensi pemilih dan isu-isu yang menjadi perhatian utama masyarakat. Hasil survei sering kali mempengaruhi perilaku pemilih, terutama pada pemilih muda yang mungkin lebih rentan terhadap pengaruh opini mayoritas. Namun, ada juga kritik terhadap metode survei yang digunakan, beberapa pihak berargumen bahwa survei dapat menciptakan efek ikut serta, di mana pemilih cenderung memilih kandidat yang dianggap populer berdasarkan hasil survei. Hal ini menunjukkan bahwa survei tidak hanya mencerminkan opini publik tetapi juga dapat membentuknya.

Secara keseluruhan, hubungan antara pemilu dan opini publik di Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Proses pemilihan umum tidak hanya melibatkan suara individu tetapi juga merupakan refleksi dari wacana sosial yang lebih luas. Media sosial dan survei politik merupakan dua faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana opini publik terbentuk dan berubah selama periode pemilu. Oleh karena itu, memahami hubungan ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi, mulai dari kandidat hingga pemilih itu sendiri. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat dan kritis terhadap sumber berita, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pemilu mendatang.

2. Pengaruh Polling dalam Opini Publik

Polling atau survei opini publik adalah alat yang digunakan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks Indonesia, polling telah menjadi salah satu instrumen penting untuk menganalisis dinamika politik dan sosial, khususnya menjelang pemilihan umum. Pengaruh polling tidak hanya mencerminkan opini publik tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk pandangan masyarakat. Hal ini terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti penyediaan informasi, pembentukan opini, hingga efek psikologis yang ditimbulkan oleh hasil polling yang dipublikasikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengaruh Hasil Polling terhadap Pembentukan Opini Publik dalam Segmentasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa polling memainkan peran besar dalam membentuk opini publik, khususnya di kalangan pemilih muda. Studi tersebut menemukan bahwa 30,5% opini pemilih pemula dipengaruhi oleh hasil polling. Persentase ini menunjukkan bahwa polling dapat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih pemula, yang sering kali kurang memiliki referensi kuat atau pengalaman politik sebelumnya, cenderung menggunakan hasil polling sebagai panduan dalam membentuk sikap politik mereka.

Media massa memiliki peran penting dalam menyebarluaskan hasil polling kepada masyarakat. Penyajian hasil polling oleh media sering kali disertai dengan



narasi tertentu yang dapat memengaruhi cara masyarakat menafsirkan hasil tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Kumparan, dijelaskan bahwa hasil survei politik yang dipublikasikan oleh media dapat memengaruhi persepsi publik, terutama jika disertai analisis dan interpretasi tertentu. Namun, penting untuk dipahami bahwa polling hanya menangkap opini publik pada saat survei dilakukan. Opini tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung pada dinamika sosial dan politik. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali gagal memahami keterbatasan ini, sehingga menjadikan hasil polling sebagai kebenaran absolut.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan polling di Indonesia adalah menjaga akurasi dan integritas hasil polling. Banyak lembaga survei menghadapi kritik karena dianggap kurang transparan atau memihak kepada kepentingan tertentu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas dan independensi lembaga survei. Dalam jurnal tersebut, dijelaskan bahwa polling harus dilakukan dengan metodologi yang transparan, termasuk memilih sampel yang representatif, menyusun pertanyaan yang netral, dan menyajikan hasil yang objektif. Ketika lembaga survei gagal memenuhi standar ini, hasil polling yang dihasilkan dapat menyesatkan masyarakat, menciptakan polarisasi, dan bahkan mengancam kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Polling juga dapat memicu efek psikologis tertentu di kalangan masyarakat. Fenomena seperti bandwagon effect atau efek ikut-ikutan sering terjadi, di mana masyarakat cenderung mendukung opini atau kandidat yang terlihat unggul dalam polling. Misalnya, seorang kandidat yang memimpin hasil polling cenderung menarik lebih banyak dukungan dari masyarakat yang ingin merasa berada di pihak mayoritas. Sebaliknya, underdog effect atau efek simpati kepada pihak yang terlihat kalah dalam polling juga dapat muncul. Hal ini menunjukkan bahwa hasil polling tidak hanya mencerminkan opini publik tetapi juga memengaruhi perilaku dan pilihan masyarakat.

Di sisi lain, jika dilakukan dengan benar, polling dapat memperkuat proses demokrasi dengan memberikan gambaran yang akurat tentang preferensi masyarakat. Hasil polling yang andal dapat membantu pemerintah dan pembuat kebijakan memahami kebutuhan masyarakat serta merumuskan kebijakan yang relevan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, masyarakat perlu meningkatkan literasi politik mereka agar mampu membaca dan memahami hasil polling secara kritis. Publik perlu menyadari bahwa hasil polling adalah cerminan dari opini pada suatu waktu tertentu dan tidak selalu mencerminkan kebenaran absolut.

3. Legitimasi Politik

Legitimasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang artinya hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah pembenaran. Secara istilah legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Legitimasi politik dapat diartikan sebagai keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun



pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud. Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat.

Legitimasi merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin/pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Jadi pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin yang sah untuk memerintah, membuat kebijakan, serta melaksanakan keputusan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negara. Bertolak dari pengertian politik yang dikemukakan oleh Joice Mitchel yakni politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya, maka proses legitimasi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, negara dan pemerintah. Sebelum pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijaksanaan umum tersebut ialah bagaimana pemerintah dapat diterima dan diakui kedaulatannya oleh seluruh masyarakat.

Dengan mendapatkan legitimasi, seorang pemimpin atau penguasa akan dihadapkan dalam dua situasi. Pertama, ketika pemimpin atau penguasa dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan atau kehendak masyarakat yang dipimpin, maka kepercayaan tinggi akan didapatnya, sehingga kehidupan politik akan damai, aman, dan harmonis. Kedua, ketika pemimpin yang disahkan tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan rakyat, maka akan menjadi bumerang bagi pemimpin ini. Hasilnya, kehidupan politik jauh dari kata aman dan sejahtera. Bahkan justru dapat menjadi tombak kehancuran sebuah kelomok masyarakat.

Kebijakan politik sebagai bagian dimensi legitimasi politik dengan melihat kehidupan politik dalam suatu pemerintah berdasarkan perspektif kelembagaan baru (*New Institutionalisme*) yang menekankan bukan pada proses-proses yang terjadi di dalamnya yang menjadi fokus utama, melainkan menekankan pada gejala-gejala (fakta) kausalitas dari legitimasi kebijakan politik secara akal sehat (*common sense*) yang menjelaskan legitimasi politik di lingkungan pemerintah sesuai praktek politik formal dan jaringan organisasi informal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik memiliki peran strategis dalam membentuk sistem demokrasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa opini publik secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi politik, media massa, polling dan legitimasi politik. Selain itu, opini publik berdampak pada kebijakan politik, hasil pemilu dan kestabilan politik. Oleh karena itu, memahami dinamika opini publik sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik.



Daftar Pustaka

- Adiputra, W. M. (2008). Polling sebagai Ekspresi Opini Publik, Pilar Kelima Demokrasi? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 195-218.
- Castells, M. (2015). *Networks Of Outrage and Hope. Polity Press.*
- Dahl, R. A. (2000). *On Democracy. Yale University Press.*
- Ekawati, E. N. (2012). Legitimasi Politik Pemerintah Desa (Studi Pengunduran Diri Kepala Desa Di Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 58-72.
- Farid, M. (2023). Pembentukan Opini Publik dalam Penelitian Umum. *Jurnal Al-Wijdan Kajian Penidikan Islam.*
- Fauza, N. (2020). Legitimasi Politik Tokoh Agama: Kajian Interpretatif Masyarakat Multiagama Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 143-161.
- Habermas, j. (2006). *Political Communication and the Public Sphere. Jurnal Filsafat Eropa.*
- McNair, B. (1999). *Pengantar Komunikasi Politik Edisi 2. eBook penerbitan 11 Maret 2002.*
- Putri, D. T. (2020). Pengaruh Hasil Polling Terhadap Pembentukan Opini Pemilih Pemula. *Jurnal Kerjasama KPU RI dan Konsorsium Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 96-128.